



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PERDAGANGAN PERDANA BURSA CPO

**Yosephus Mainake**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[yosephus.mainake@dpr.go.id](mailto:yosephus.mainake@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Bursa minyak kelapa sawit atau bursa *crude palm oil* (CPO), resmi memulai transaksi perdana pada tanggal 20 Oktober 2023. Transaksi ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi Indonesia dalam menciptakan harga referensi minyak kelapa sawit di tingkat global. Peluncuran bursa CPO menandai langkah penting bagi Indonesia yang selama ini menjadi pemasok kelapa sawit utama dunia tetapi belum memiliki bursa sendiri untuk menentukan harga referensi. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, menyebut keikutsertaan pengusaha sawit pada bursa CPO bersifat sukarela sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Saat ini sudah ada 18 (delapan belas) pelaku usaha yang akan ikut serta dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) ditunjuk sebagai penyelenggara.

Perdagangan di bursa ini akan menempatkan penjual dan pembeli pada *level playing field* karena mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Seluruh CPO diperdagangkan dengan kontrak pengiriman ke tangki CPO di Pelabuhan Dumai, Riau. Nilai CPO yang disepakati sudah termasuk ongkos kirim dari tangki penjual ke tangki pembeli di Pelabuhan Dumai. ICDX menetapkan nilai awal CPO pada perdagangan perdana tersebut mencapai Rp12.485 per kg. Angka tersebut diperoleh setelah mempertimbangkan harga CPO di bursa Rotterdam dan bursa Malaysia. Perdagangan perdana bursa CPO menghasilkan harga CPO yang lebih rendah 9,45% dari harga yang ditetapkan ICDX. Kepala Bappebti berharap pemain bursa CPO dapat lebih aktif dalam perdagangan., karena hal tersebut akan menciptakan harga CPO yang lebih adil di dalam negeri. Bursa CPO terbagi dalam tiga sesi perdagangan dan jumlah kontrak yang diperdagangkan pada setiap sesi adalah enam unit. Keenam unit tersebut kemudian dibagi untuk dua lokasi pengiriman CPO, yakni Pelabuhan Dumai, Riau dan Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara. Setiap pelabuhan memiliki tiga kontrak, yakni CPO bersertifikat ISPO, CPO bersertifikat *roundtable on sustainable palm oil* (RSPO), dan CPO tanpa sertifikat.

Perdagangan perdana bursa CPO hanya terjadi pada kontrak CPO bersertifikat ISPO. Kepala Bappebti berharap, ICDX mengembangkan jumlah kontrak tersebut pada masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kontrak selanjutnya dapat berupa pengiriman dengan skema *freight on board* (FoB) atau *cost, insurance, and freight* (CIF). Pakar ekonomi pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menyebut keberadaan bursa CPO diharapkan bisa menjadi referensi harga penting di masa yang akan datang dan mengangkat kredibilitas produk sawit Indonesia.

*Effort* menjadikan bursa CPO Indonesia sebagai tolak ukur harga CPO global, tentu butuh waktu. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kementerian Perdagangan, Bappebti, dan pengusaha sawit, antara lain:

1. Dari sisi hukum, yaitu *law enforcement* akan memberikan kepastian hukum sebagai hal pokok untuk membangun kepercayaan. Singkatnya, legalitas kredibilitas adalah kunci agar bursa CPO dipercaya oleh pengusaha.
2. Menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan.
3. Perbaiki tata kelola, misalnya pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara *real time*.
4. Melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di bursa CPO.
5. Bappebti harus memastikan adanya prinsip kesetaraan perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, ICDX sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa sebagaimana Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023 harus melakukan pengawasan dan monitoring yang kuat.
6. Selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah *business to business*. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil. Karena bisnis sawit umumnya bisnis jangka panjang maka kepastian ketersediaan bahan baku menjadi hal utama dan lebih mudah didapatkan melalui kontrak langsung *business to business*.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia, mengingat Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Untuk itu Keberadaan bursa CPO diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola industri kelapa sawit domestik.

## Atensi DPR

Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri. Kehadiran bursa juga menjawab keluhan dari pelaku usaha yang selama ini harga acuan kadang tidak tepat dan berdampak pada pajak yang lebih tinggi. Setelah CPO, pemerintah ingin komoditas ekspor strategis lainnya seperti kopi, karet, kakao hingga nikel, masing-masing dapat memiliki bursa berjangka, sehingga nantinya bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan optimistis perbaikan ini akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Indonesia menjadi negara maju tepat pada satu abad kemerdekaan, yaitu tahun 2045. Komisi VI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan perlu memastikan pelaksanaan proses bursa CPO agar berjalan dengan baik dan memastikan adanya koordinasi antar-*stakeholders* terkait seperti Kementerian Perdagangan, Bappebti, dan pelaku usaha dalam melakukan pengawasan.

## Sumber

beritainvestor.id, 24 Oktober 2023;  
*Bisnis Indonesia*, 26 Oktober 2023;  
 Indonesiawindow.com, 13 Oktober 2024;  
 katadata.co.id, 20 Oktober 2023.



Koordinator Sali Susiana  
 Polhukam Puteri Hikmawati  
 Ekkuinbang Sony Hendra P.  
 Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

LAYOUTER

@anlegbkofficial

Polhukam  
 Simela Victor M.  
 Prayudi  
 Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.  
 Sita Hidriyah  
 Noverdi Pujana S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang  
 Mandala Harefa  
 Juli Panglima S.  
 Sri Nurhayati Q.  
 Sulasi Rongiyati  
 Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
 Teddy Prasetiawan  
 T. Ade Surya  
 Masyithah Aulia A.  
 Yosephus Mainake

Kesra  
 Yulia Indahri  
 Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
 Nur Sholikah P.S.  
 Fieka Nurul A.